



## Sinergi Pemerintah dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan

**Jakarta, 14 Agustus 2017** – Ditengah kelesuan ekonomi global dan regional, perekonomian Indonesia masih terus tumbuh di kisaran 5 persen. Di sisi lain, Pemerintah juga sedang berusaha meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan memperkecil angka kemiskinan dan ketimpangan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan telah digagas oleh berbagai kementerian. Salah satunya adalah melalui akses permodalan yang dibuka kepada masyarakat miskin dan program inklusi keuangan. Pemerintah telah menyusun program penurunan tingkat kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pada 2019, angka kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran tujuh hingga delapan persen. Sedangkan inklusi keuangan kita ditargetkan mencapai 75 persen pada tahun 2019.

Target pembangunan tersebut tentunya harus melibatkan banyak pihak dan sinergi dari berbagai kementerian. Semua pihak harus bekerja bersama untuk saling mengisi, sehingga tugas berat Pemerintah dalam mencapai target pembangunan dapat tercapai.

Sebagai wujud sinergisitas kementerian, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mencanangkan program mengangkat ekonomi rakyat, dengan melakukan *pilot project* pembiayaan untuk masyarakat kecil terutama ultra mikro di beberapa wilayah.

Kementerian Sosial, telah menyusun program penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) e-warong. Program yang saat ini sedang dalam *piloting* untuk usaha kecil tersebut bukan merupakan bantuan sosial, tetapi dana bergulir dengan syarat utama adalah pendampingan kepada kelompok masyarakat tersebut. Program ini untuk masyarakat usaha mikro agar tidak bergantung pada bantuan sosial yang jumlahnya terbatas dan dengan pendampingan ini agar masyarakat dapat didukasi untuk naik tingkat dari penerima bantuan menjadi usaha yang *bankable*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengembangan modal usaha kelautan dan perikanan (LPMUKP) membantu nelayan dalam memperoleh akses permodalan untuk usahanya. Hingga saat ini nelayan Indonesia masih mengalami permasalahan sulitnya akses permodalan, terutama dalam mendapatkan kredit yang dilayani dengan mudah dan cepat sehingga industri kelautan dan perikanan akan lebih maju.

Kementerian Koperasi dan UKM, memiliki peran penting dalam penguatan lembaga koperasi untuk meningkatkan inklusi keuangan agar dapat mengangkat ekonomi rakyat terutama anggota dengan usaha mikro dan ultra mikro melalui program pengembangan wirausaha pemula bagi usaha mikro dalam rangka mendukung Gerakan Kewirausahaan Nasional. Sampai ini, pengembangan wirausaha pemula melalui program bantuan pemerintah masih dalam jumlah yang terbatas. Dengan adanya program pembiayaan ultra mikro maka akan memberikan akses yang mudah kepada anggota koperasi tersebut. Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang belum memenuhi syarat mendapatkan pinjaman melalui pemberian pelatihan untuk para pendamping-

pendamping yang akan mengajarkan kepada para anggota koperasi sehingga menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan usahanya.

Dengan program-program yang telah dilaksanakan Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koperasi, Kementerian keuangan melalui BLU PIP mengkoordinasikan pendanaan (*coordinated fund*) yang dapat membiayai program-program dimaksud terutama yang dapat menjangkau masyarakat ultra mikro. Pembiayaan ultra mikro dengan segmen Rp 10 juta ke bawah dengan syarat yang sangat mudah yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), keterangan memiliki usaha, dan tidak punya hutang pada lembaga keuangan.

Program ini juga melibatkan lembaga-lembaga yang telah profesional di bidang penyaluran kredit program diantaranya PT Bahana Ventura (BAV), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, beberapa koperasi yaitu Komida dan AKR, yang tidak hanya akan melakukan penyaluran namun juga melakukan pendampingan, sehingga masyarakat penerima manfaat dapat menjalankan usahanya dan menaikkan kesejahteraannya. Lembaga yang terlibat tersebut juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga akan lebih terjaga dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itulah, kami mengundang OJK untuk bersama-sama mengawasi program ini.

Di dalam *Leaders Declaration* pada pertemuan G20 beberapa waktu yang lalu di Hamburg, Jerman, disebutkan bahwa transformasi digital adalah merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan global, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan serta dapat berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan. Di dalam pertemuan G20 tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara, juga menyampaikan kearifan pola digitalisasi di Indonesia dalam 3 (tiga) bidang utama, yaitu ekonomi berbagi (*shared economy*), digitalisasi angkatan kerja (*workforce digitalization*), dan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan tujuan memberikan ekosistem yang sesuai dalam proses digitalisasi.

Komitmen Menteri Komunikasi dan Informatika dalam pertemuan G20 tersebut tentu saja sejalan dengan sasaran program ini untuk usaha ultra mikro yang sangat besar, mencapai lebih dari 44 juta usaha atau sekitar 72,1% dari jumlah UMKM secara nasional. Untuk mendukung penyebaran dan kemudahan dalam mengakses program ini serta pendampingannya dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dan akan terus menyediakan infrastruktur komunikasi dan ekosistem yang menjangkau wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) serta wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga mempermudah koperasi, lembaga keuangan, dan nelayan kecil serta masyarakat miskin lainnya untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana mendekatkan jarak ke sumber dana dapat terwujud.

#### Sinergi Kementerian:

1. Kementerian Sosial
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Koperasi dan UKM
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Kementerian Keuangan

#### Info lebih lanjut hubungi:

Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan  
Gd. Djuanda II Lantai 18  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3449230 ext. 6887; Fax (021) 3512238  
Situs : [www.pip-indonesia.com](http://www.pip-indonesia.com)